

Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak, disahkannya Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Semarang, 31/5 (Roll News) - Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak, disahkannya Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto, di Semarang, Minggu, keberadaan Pengadilan Tipikor di tanah air terancam dibekukan, karena tak ada payung hukumnya.

"Pasalnya, RUU Tipikor sampai sekarang tak kunjung disahkan oleh DPR. Padahal RUU tersebut telah diserahkan kepada DPR sejak September 2008," ujarnya.

Menurut Eko, bila sampai 19 Desember 2009 RUU Tipikor tak juga disahkan menjadi UU, maka keberadaan Pengadilan Tipikor akan dibubarkan.

"Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas akhir UU Tipikor adalah 19 Desember 2009. Kami menilai ada sabotase dari kalangan anggota DPR, sehingga tak segera membahas RUU Tipikor," ujarnya.

Apabila Pengadilan Tipikor bubar, lanjut dia, maka upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sia-sia.

"Jika kasus korupsi disidangkan di pengadilan umum (Pengadilan Negeri) putusan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia kurang maksimal," ujarnya.

Padahal, kata dia, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor kepada pelaku korupsi cukup tinggi. "Apabila dikembalikan ke pengadilan umum kurang maksimal, bahkan koruptor bisa divonis bebas," ujarnya.

Untuk menggalang dukungan, puluhan aktivis KP2KKN Jateng menggelar aksi damai maspada bahaya laten korupsi dan mendesak pengesahaan UU Pengadilan Tipikor yang dipusatkan di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Minggu (31/5) pagi.

Aksi tersebut ditandai dengan penyebaran pin, stiker, dan gelang warna merah dari KPK tentang waspada bahaya laten korupsi masing-masing berjumlah 1.000 buah.

Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk berukuran 5X2 meter bertuliskan "Selamatkan Pengadilan Tipikor".

Kepada masyarakat yang kebetulan melintasi kawasan tersebut diminta untuk memberikan dukungan dengan memberikan tanda di atas spanduk.

Menurut rencana, spanduk yang berisi ratusan tanda tangan akan diserahkan kepada presiden.

Pada kesempatan Dalam kesempatan itu, KP2KKN juga membagikan 1.000 pin, stiker, dan gelang warna merah dari KPK tentang waspadai bahaya laten korupsi.